

TNI DAN DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Mungkinkah TNI demokratis? Tidak terhindarkan bahwa pembicaraan tentang ini harus dimulai dengan pendapat yang cukup umum di kalangan masyarakat luas mengenai TNI dan demokrasi. Pendapat itu, seperti telah kita ketahui bersama, terbagi antara yang optimis dan pesimis. Yang optimis mengatakan bahwa TNI dapat, dan harus, memainkan peranannya sendiri dalam usaha bersama menumbuhkan demokrasi. Dan yang pesimis mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa tidak mungkin TNI sebagai kekuatan militer memiliki komitmen yang sejati pada nilai-nilai demokrasi. Pendapat ini dikaitkan dengan premis bahwa “militerisme” dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi.

Betulkah demikian? Persoalan ini harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Misalnya, untuk Indonesia, sudah biasa diajukan argumen bahwa TNI atau kekuasaan militer mempunyai latar belakang sejarah yang khusus berkenaan dengan proses-proses kelahirannya selaku tentara rakyat. Dari sudut pandang ini, TNI tidak lain adalah penumbuhan dan pengembangan lebih lanjut dari badan yang menghimpun para pejuang kemerdekaan yang “kebetulan” bersenjata, mendampingi para pejuang lainnya yang tidak bersenjata. Dari sini ditemukanlah pembenaran bagi pelibatan TNI dalam proses-proses sosial politik yang pernah melandasi konsepnya yang unik, yaitu “Dwifungsi ABRI.”

Mungkin di sini tidak lagi relevan memperdebatkan absah-tidaknya pandangan tersebut. Yang lebih relevan, mengingat

hal-hal yang sudah “*given*” tentang TNI, bagaimanakah kiranya peran positif TNI dalam usaha bersama mewujudkan demokrasi di masa depan. Agaknya peran dan harapan ini berpusat pada tiga hal berikut ini.

Pertama, demokrasi tidak mungkin tanpa adanya prinsip-prinsip yang di pra-anggapkan sebagai dengan sendirinya benar (*presumed truth*) dan diterima oleh semua warga negara. Dalam hal negara kita, prinsip-prinsip itu ialah Pancasila dan UUD 45. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat misalnya, mendasarkan seluruh konsep dan kiprah demokrasinya atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi. Semua prinsip itu melandasi konsep keamerikaan, “*Americanism*”). Maka peran TNI dalam demokrasi, sesuai dengan doktrinnya sendiri, ialah mempertahankan “*presumed truth*” itu dan mengembangkannya sebagai titik-tolak keterlibatannya dalam demokrasi di Indonesia.

Kedua, demokrasi tidak mungkin tanpa stabilitas dan keamanan. Berkenaan dengan ini sudah sejak awal 60-an, Bung Hatta, seorang tokoh yang dipandang sebagai “hati nurani” bangsa, memperingatkan bahwa demokrasi yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan situasi kaotik akan memberi pembenaran bagi tampilnya seorang kuat (*strong man*) yang akan mengatasi kekacauan dengan bertindak sebagai diktator, tiran atau malah fasis. Maka TNI jelas sekali akan membantu pengembangan demokrasi itu jika mampu menjaga stabilitas dan keamanan. Tetapi dengan sendirinya hal itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga serasi dan seiring dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yang intinya ada dalam pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, selain penghormatan pada hak-hak asasi pribadi semua warga negara.

Lebih jauh, di mana pun memang stabilitas dan keamanan adalah prasyarat bagi pembangunan yang lestari. Tetapi jika banyak masyarakat berada di bawah garis kerniskinan, demokrasi akan diancam oleh efek-efek dari kemiskinan itu. Eksperimen India dengan demokrasinya yang sekalipun cukup mengagumkan,

menunjukkan bahwa demokrasi di sana sering “tenggelam” oleh efek-efek negatif kemiskinan. Karena itu, juga untuk demokrasi, TNI berperan melanjutkan tugas “tradisional”-nya, yaitu menjaga kelestarian pembangunan nasional atas dasar stabilitas dan keamanan. (Tentang korelasi tingkat tertentu kemakmuran dengan demokrasi dibuktikan oleh kecenderungan yang cukup umum negara-negara industri baru yang semakin maju pada tatanan sosial politik yang demokratis, seperti Korea Selatan dan Taiwan).

Ketiga, para anggota TNI sendiri harus benar-benar menghayati demokrasi sebagai “cara hidup” (*way of life*). Tanpa penghayatan seperti itu maka usaha untuk menegakkan demokrasi akan menjadi palsu, seperti patung tanpa nyawa. Di mana-mana, termasuk di negara kita, sering eksperimen demokrasi dan perjuangannya terhalang oleh mereka yang mengaku “demokratis” namun tidak menunjukkan sikap pribadi yang demokrasi, karena gagal meyakini dan mempraktikkan demokrasi itu sebagai “*way of life*.” Misalnya adalah suatu ironi, bahkan *contradictio in terminus*, bahwa seseorang, atas nama demokrasi, memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Jelas sekali bahwa hal itu terjadi karena dominannya unsur *vested interest* orang atau kelompok bersangkutan. [❖]